



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM



REVIU RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2011 – 2015

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

*Jalan Ngurah Rai No. 29 Tlp. (0363) 21037 Amlapura*

## KATA PENGANTAR

Atas asung kertha wara nugraha *Ida Hyang Widi Wasa*, maka dapat disusun reviu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011 – 2015. Adapun penyusunan reviu rencana strategis ini adalah untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karangasem sesuai dengan dasar hukum penyusunan Renstra yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Renstra sebagai panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Reviu Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu s/d Tahun 2015. Reviu rencana strategis ini disusun sehubungan dengan adanya perubahan-perubahan indikator kinerja khususnya pada indikator kinerja utama (IKU) terhadap evaluasi hasil seluruh pelaksanaan kegiatan. Setelah penetapan reviu renstra ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih matang dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang relevan dengan penetapan indikator-indikator kinerja seperti capaian kinerja, output, outcome, serta kelompok sasaran kegiatan.

Dalam penyusunan dokumen reviu renstra ini tentu masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat diharapkan. Sebagai institusi yang melaksanakan urusan wajib sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007, tentu diharapkan para pengambil kebijakan memberikan perhatian kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu instansi yang mengusung tugas strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Semoga *Ida Hyang Widi Wasa* senantiasa membimbing kita sehingga visi dan misi dinas tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Amlapura, 7 Januari 2013

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN KARANGASEM,

Ir. GDE NGURAH YUDIANTARA, M.M.

NIP. 19630929 198903 1 016

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 15 Ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyiapkan Rencana Strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 7 Ayat 1). Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD (Pasal 19 ayat 4). Reviu rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem pada tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015. Reviu rencana strategis ini menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam merencanakan program dan kegiatan pada tahun 2013-2014. Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 berpedoman pada peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2011-2015;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elektronik government;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per./M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/Menpan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Teta Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem;
22. Peraturan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Karangasem
2. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan bidang komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun dari Tahun 2011-2015
3. Sebagai alat tolok ukur penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem
4. Sebagai gambaran tentang kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem masa kini dan penjabaran tentang kondisi yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Bupati Karangasem.

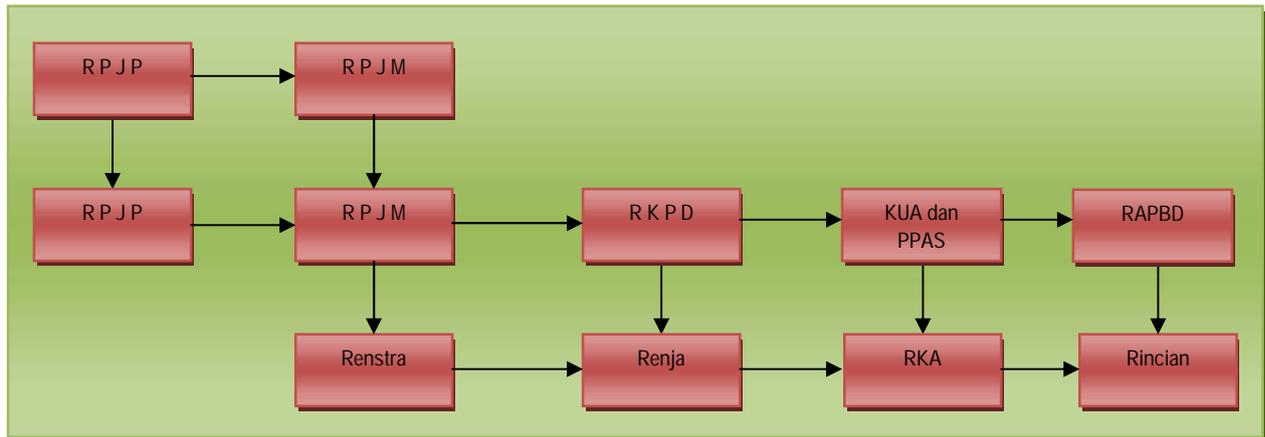
#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 serta merealisasikannya dalam perencanaan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

### **1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2011-2015 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2011-2015. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Hubungan Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan dalam gambar di bawah ini :



## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut.

**Bab I Pendahuluan** menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**Bab II Gambaran Pelayanan SKPD** menguraikan tugas fungsi dan struktur organisasi SKPD, sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

**Bab III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi** menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra SKPD, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan** menguraikan visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan SKPD.

**Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif** menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VI Penutup**, pada dasarnya menekankan pentingnya fungsi renstra dalam penyusunan renja SKPD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

Kemajuan teknologi informasi memasuki abad ke-21 berkembang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru. Dikatakan suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba guna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bersosial, berbudaya, berbisnis, dan berpolitik serta bernegara. Teknologi sangat berkembang pesat dan dipercaya dan belum kelihatan titik jenuhnya yang disertai pula dengan keadaan yang menggembirakan dengan harganya yang semakin menurun. Dengan demikian, pemanfaatannya semakin layak dalam kegunaannya di bidang organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Perpaduan sejumlah teknologi telah pula memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dengan kecepatan yang luar biasa sehingga dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar untuk membentuk opini publik yang dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju era informasi yang merupakan sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan kecepatan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan antar bangsa.

Sejalan dengan berkembangnya teknologi, juga diiringi dengan perkembangan informasi di masyarakat. Informasi berjalan cepat, aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tidak lagi terkendala periodisitas. Saat terjadi peristiwa besar, serentak beredar informasi dan interaksi. Karena interaktif, informasi pun sekaligus bermakna komunikasi. Inilah realitas baru informasi; berkat revolusi informasi dan komunikasi, publik menjadi konsumen dan sekaligus produsen informasi.

Keterbukaan informasi telah membawa pula dampak pada pembenahan pelayanan di bidang informasi. Hal ini sangat penting, mengingat pelayanan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat selama ini belum optimal. Selain terjadinya paradigma,

media massa dalam pemberitaannya juga sering memasukan setting media yang berakibat apa yang dilakukan pemerintah tidak mendapat porsi yang sebenarnya dalam pemberitaannya di media massa. Sehubungan dengan fungsi komunikasi dan informatika, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Karangasem menjalankan fungsinya antara lain pemenuhan hak tahu publik, mengakomodir aspirasi masyarakat untuk informasi perumusan kebijakan publik dan citra positif badan publik negara. Informasi berada dalam garda depan kompetisi mendahului aset-aset yang lain. Untuk itulah, sejalan dengan pencerdasan bangsa dan masyarakat oleh penggunaan teknologi informasi, maka kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem berperan dalam menunjang kinerja birokrasi yang diarahkan pada optimalisasi teknologi informasi dalam pemerintahan yang dikenal dengan *electronic government (e-Gov)* menuju *good governance*.

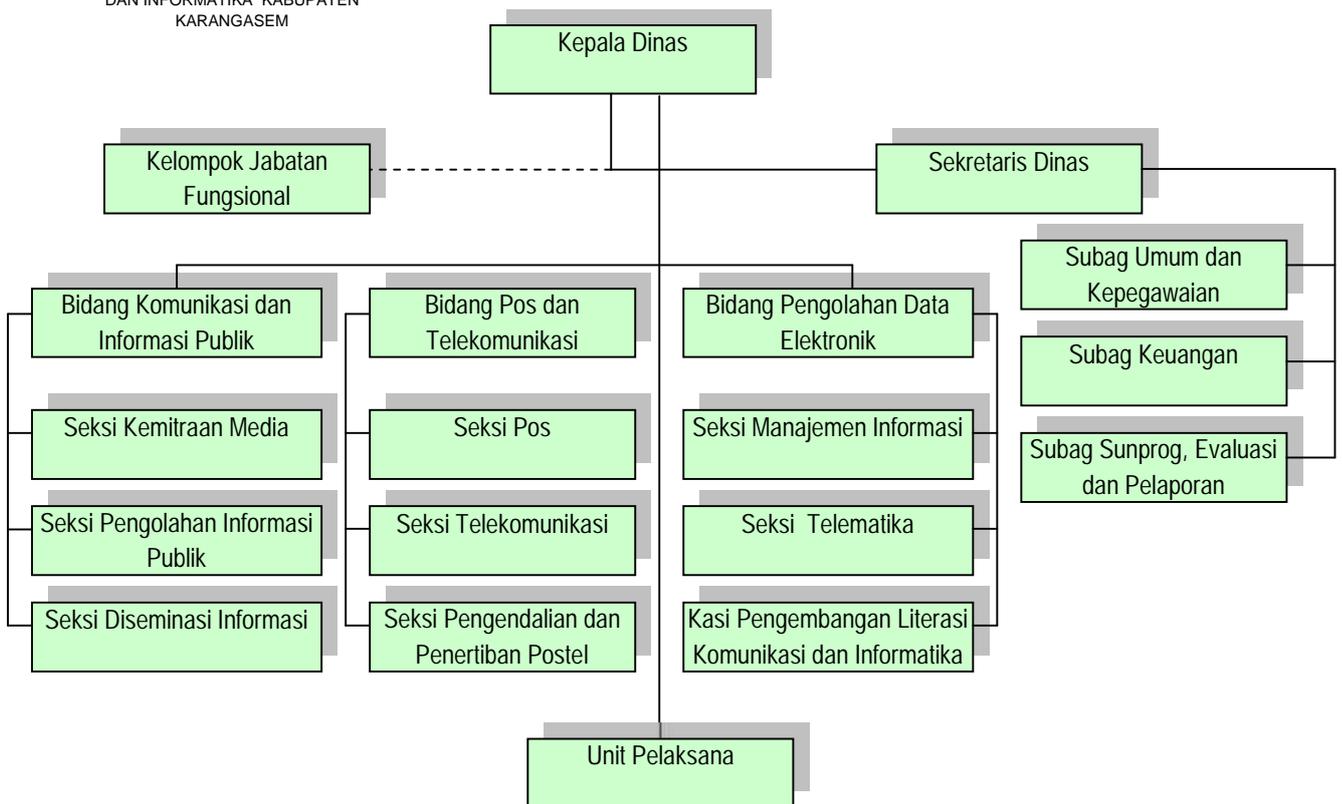
Ada suatu pola sinergis antara penerapan *e-government* dengan tercapainya *good governance*. Jalur pelayanan birokrasi yang pendek, cepat, efisien, dan efektif serta mempermudah akses masyarakat dengan pemerintah yang sangat memungkinkan akses kontrol masyarakat adalah manfaat kemajuan pemanfaatan media elektronik. Melalui media elektronik, pekerjaan yang berskala besar serta pelayanan yang sangat cepat akan dapat dilaksanakan secara optimal.

Beberapa kemajuan bidang komunikasi dan informatika saat ini yang dibantu dengan kemajuan teknologi di antaranya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya penyedia akses komunikasi dan peran kontrol yang didasari dengan penerapan keterbukaan informasi publik. Masyarakat bukan saja sebagai penonton, tetapi memiliki andil dalam menjalankan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Keterbukaan informasi ini juga difasilitasi dengan sistem informasi berbasis web yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Dalam bidang telekomunikasi yang difasilitasi oleh manara telekomunikasi, keberadaannya sudah dilaksanakan dengan peraturan daerah. Demikian juga peningkatan fungsi lembaga informasi, pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk peningkatan persaingan, transparansi, dan efisiensi sudah bisa terlaksana.

## **2.1 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 12 Kepala Seksi (Eselon IV). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
KARANGASEM



## 2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
  - b. penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas komunikasi dan informatika meliputi sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, pengolahan data elektronik, serta bidang pos dan telekomunikasi.
- d. pengkoordinasian dan pembinaan UPTD.
- e. pelaksanaan tugas dari Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2001 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu: (1) **eksternalitas**, maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) **akuntabilitas**, maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; (3) **efisiensi**, penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut maka urusan pemerintahan dibagi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*). Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan kedua urusan tersebut, **urusan komunikasi dan informatika adalah merupakan wajib**, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut harus ada dan menjadi perhatian pemerintahan daerah. Dalam urusan komunikasi dan informatika, selanjutnya dicantumkan rincian bidang sampai sub sub bidang, yang nantinya dipakai pedoman sebagai penyusunan tupoksi unit kerja (SKPD).

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

## I. Kepala Dinas

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas;

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan rencana kegiatan Dinas.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas.

- c. Merumuskan kebijaksanaan teknis operasional Dinas meliputi bidang komunikasi dan informasi publik, bidang pos dan telekomunikasi dan bidang pengolahan data elektronik.
- d. Memimpin dan membina pelaksanaan tugas-tugas dibidang administrasi umum meliputi: organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- e. Menyusun kebijakan teknis operasional sesuai dengan kewenangan Dinas.
- f. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- h. Mengevaluasi dan membina penyusunan laporan kegiatan Dinas.
- i. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **II. Sekretaris**

Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Sekretariat Dinas.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Sekretariat Dinas.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan penyusunan program, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas.
- d. Membina dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Mengevaluasi dan merumuskan laporan kegiatan Sekretariat Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

### **2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Mengkompulir perumusan rencana kegiatan Sekretariat Dinas.
- d. Melaksanakan tugas-tugas administrasi umum meliputi organisasi dan tata laksana, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas.
- e. Mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di bidang kepegawaian seperti mutasi, pensiun, cuti, karis/karsu, karpeg dan perjalanan dinas serta tugas-tugas kepegawaian lainnya.
- f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan karier.
- h. Mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2.2 Sub Bagian Keuangan.**

Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub.Bagian Keuangan.
- c. Mengkompulir perumusan rencana kegiatan pengelolaan rencana keuangan Dinas.
- d. Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Dinas.
- e. Menata dan menyimpan arsip hasil pelaksanaan pengelola keuangan.
- f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- h. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan pengelolaan keuangan Dinas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas Dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2.3 Sub Bagian Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan.**

Sub Bagian Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kegiatan Sub Bagian Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bagian Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Mengkompulir perumusan rencana kegiatan Dinas.
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- g. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Sunprog, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **III. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.**

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
- d. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- e. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- g. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada atasan.

#### **3.1 Seksi Kemitraan Media**

Kepala seksi Kemitraan Media pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai Tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Kemitraan Media.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Kemitraan Media.
- c. Memproses pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan media cetak, radio, dan televisi dalam rangka penyebaran informasi.

- e. Membina serta memberdayakan FORMASDA, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan lembaga media tradisional sebagai sumber dan media informasi.
- f. Memproses pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan atau televisi.
- g. Membina dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Kemitraan Media, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **3.2 Seksi Pengolahan Informasi Publik**

Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Pengolahan Informasi Publik.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pengolahan Informasi Publik.
- c. Mengumpulkan berbagai jenis dokumen dan bahan-bahan informasi lainnya dari berbagai sumber dan atau media.
- d. Menyusun dan mengembangkan berbagai jenis dokumen dan bahan-bahan informasi menjadi media, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik dalam rangka diseminasi Informasi Publik.
- e. Mengolah dan mengelola informasi skala kabupaten dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Kabupaten.
- g. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Pengolahan Informasi Publik, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan kepada atasan.

### **3.3 Seksi Diseminasi Informasi**

Kepala Seksi Diseminasi Informasi pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Diseminasi Informasi.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Diseminasi Informasi.
- c. Melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan informasi dalam skala regional maupun nasional dalam rangka membangun masyarakat informasi melalui media modern dan media tradisional melalui tatap muka, sarasehan, dialog publik, dan pameran pembangunan.
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
- e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- g. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Diseminasi Informasi, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **IV. Bidang Pos dan Telekomunikasi**

Kepala Bidang Pos dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- i. Mengkoordinasikan perumusan rencana Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- j. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pos dan Telekomunikasi.
- l. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Pos dan Telekomunikasi, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

##### **4.1 Seksi Pos**

Kepala Seksi Pos pada Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kegiatan seksi Pos.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pos.
- c. Mengupayakan penyelenggaraan pelayanan Pos di pedesaan.

- d. Memberikan rekomendasi untuk pendirian Kantor Pusat jasa titipan.
- e. Memberikan izin jasa titipan untuk Kantor agen.
- f. Melaksanakan penertiban jasa titipan untuk Kantor agen.
- g. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Pos sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4.2 Seksi Telekomunikasi**

Kepala Seksi Telekomunikasi pada Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Telekomunikasi.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Telekomunikasi.
- c. Memproses pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan areanya dalam kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.
- d. Memproses pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup local *wireline (end to end)* cakupan area dalam Kabupaten.
- e. Memberikan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
- f. Memberikan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi.
- g. Memberikan izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
- h. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- j. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Telekomunikasi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

#### **4.3 Seksi Pengendalian dan Penertiban Postel**

Kepala Seksi Pengendalian dan Penertiban Postel pada Bidang Pos dan Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Penertiban Postel.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan seksi Pengendalian dan Penertiban Postel.
- c. Melakukan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam Kabupaten, pelaksanaan telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet, dan sejenisnya.
- d. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
- e. Memproses pemberian izin instalasi penangkal petir dan genset.
- f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- h. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan seksi Pengendalian dan Penertiban, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **V. Bidang Pengolahan Data Elektronik**

Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas;

- b. Merumuskan rencana kegiatan Bidang Pengolahan Data Elektronik.
- c. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengolahan Data Elektronik.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengolahan Data Elektronik.
- e. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- f. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan hasil kegiatan Bidang Pengolahan Data Elektronik, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **5.1 Seksi Manajemen Informasi**

Kepala Seksi Manajemen Informasi pada Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi manajemen Informasi.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Manajemen Informasi.

- c. Mengembangkan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA).
- d. Mengembangkan sistem jaringan komputer dan komunikasi data tiap-tiap unit serta pengendaliannya.
- e. Membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dengan berbasis elektronik.
- f. Mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu sarana komunikasi dan penyebaran informasi bagi publik.
- g. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- i. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan seksi manajemen informasi, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

## 5.2 Seksi Telematika

Kepala Seksi Telematika pada Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan Seksi Telematika.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Telematika.
- c. Membangun serta mengembangkan jaringan infrastruktur (*network*) untuk kebutuhan jaringan komunikasi dan informasi Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- d. Membuat/menentukan spesifikasi perangkat keras/komputer untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data sebagai basis data (*database*) sehingga memudahkan akses, komunikatif, rasional, serta bermanfaat bagi pimpinan dalam penetapan kebijakan
- f. Mensinergikan keterhubungan komunikasi dan informasi data antar SKPD
- g. Membangun sistem aplikasi yang dibutuhkan oleh SKPD
- h. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan
- i. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Telematika, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- j. Memberikan saran dan pertimbangan dan teknis kepada atasan.
- k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

### **5.3 Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika**

Kepala Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika pada Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana kegiatan seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika.
- b. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika.
- c. Membangun serta mengembangkan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, akademik, maupun swasta guna meningkatkan pengetahuan serta membentuk literasi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang teknologi dan komunikasi.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam upaya meningkatkan serta mengembangkkn pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur pemerintah dan masyarakat dalam bidang teknologi dan komunikasi.
- f. Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.
- h. Mengevaluasi dan merumuskan laporan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Literasi Komunikasi dan Informatika, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
- j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

## **2.3 Sumber Daya Diskominfo**

### **2.3.1 Sumber Daya Aparatur**

Pada saat ini, arah kebijakan umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem diarahkan pada pembangunan informasi yang dibarengi dengan aplikasi teknologi yang sering diistilahkan dengan *information of technologi (IT)*. Fokus pembangunan informasi diarahkan pada diseminasi informasi terhadap publik melalui pemanfaatan lembaga komunikasi serta potensi budaya lokal, dan pembangunan IT diarahkan pada pemanfaatan teknologi yang mendukung kinerja birokrasi. Keduanya sudah jelas untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan peningkatan efisiensi. Untuk

mewujudkan ide ini, maka dilaksanakan langkah-langkah penyiapan sumber daya, baik SDM maupun pembangunan infrastruktur.

Sumber daya aparatur yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel: sumber daya aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2012**

No.	Sumber Daya Aparatur (PNS) Berdasarkan			Prosentase	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Kualifikasi Pendidikan</b>	<b>Jumlah (Org)</b>		
	S2	Magister Manajemen	1	59%	Prosentase ini membandingkan antara jumlah PNS yang sarjana dengan yang belum sarjana
		Magister Budaya dan Agama	1		
		Magister Administrasi Publik	2		
	S1	Ekonomi Manajemen	2		
		IPDN	1		
		Sarjana Komunikasi	1		
		Sarjana Sastra	1		
		Sarjana Hukum	5		
		Sarjana Sosial	1		
		Sarjana Komputer	1		
	D4	Pariwisata	1	41%	
	Jumlah		17		
	D3	Administrasi Niaga	1		
	SMA		10		
	SMP		1		
	SD		-		
	Jumlah		12		
<b>B.</b>	<b>Jenis Kelamin</b>				

	Laki		19		
	Perempuan		9		
	<b>Jumlah PNS</b>		<b>29</b>		
<b>C.</b>	<b>Tenaga Kontrak</b>		<b>8</b>		
	Jumlah Tenaga Kontrak		18		
	<b>Jumlah Total</b>		<b>47</b>		

Jika diperhatikan sumber daya manusia sesuai dengan kenyataan di atas, jelaslah bahwa berdasarkan atas kualifikasi pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan terhadap pembangunan teknologi informasi masih belum mendukung. Untuk itu, usaha untuk mendapat tambahan aparatur SDM berbasis TI sudah dilakukan, namun sampai saat ini masih belum terpenuhi. Walaupun demikian, hal ini tidaklah menjadi penghambat sehingga kegiatan tidak terlaksana, karena pada sisi yang lain, tenaga-tenaga yang terampil di bidang TI kerap diajak kerjasama, baik dalam bimbingan belajar (bintek) ataupun konsultasi.

### 2.3.2 Sumber Daya Pengembangan Informasi dan Telematika

Pembangunan Sistem Informasi dan Telematika (Sitel) sampai dengan tahun 2012, telah dilakukan pembangunan/pengembangannya, baik menyangkut piranti lunak, piranti keras, dan infrastruktur jaringan. Untuk pengembangan infrastruktur jaringan ini, *Local Area Network* (LAN) sampai saat ini baru bisa terlaksana hanya di kantor tempat kerja, jadi belum tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Walaupun demikian, untuk mensinergikan implementasi dan penerapan sitel, Diskominfo Kabupaten Karangasem telah mempunyai **Master Plan Pengembangan Teknologi Informasi**. Master plan ini nantinya akan dipakai dasar dalam pembangunan TIK di Kabupaten Karangasem yang pengembangannya diarahkan pada:

1. Desain Sistem Informasi Bidang Perekonomian Pemerintah Kabupaten Karangasem yang merupakan dokumen teknis memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang perekonomian.

2. Desain Sistem Informasi Bidang Sosial, Budaya dan Politik, yang merupakan dokumen teknis yang memuat struktur *database* dan desain antarmuka sistem informasi bidang sosial, budaya dan politik.
3. Standarisasi Teknologi Informasi, yang meliputi standarisasi penomoran *package*, basis pengembangan sistem informasi, penamaan *table database*, arahan pengembangan sitel, penamaan e-mail, kodefikasi kewilayahan, pengkodean, perangkat lunak, penggunaan sistem informasi geografis, singkatan penamaan dinas/badan/lembaga, laporan pengembangan sistem informasi dan standarisasi kodefikasi keorganisasian.
4. *Grand Design ICT for Implementation*, meliputi pentahapan langkah selama 5 tahun mendatang untuk mewujudkan sinergitas implementasi dan operasionalisasi teknologi informasi.
5. Manajemen Pembangunan Teknologi Informasi, sebagai bentuk elaborasi model ideal pentahapan pembangunan *e-Government* dalam 5 (lima) langkah tahapan yang sistematis.
6. Pemetaan potensi sitel, yang merupakan hasil pemetaan kondisi terkini sumber daya sitel masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten/Kota.
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) Sitel, merupakan dokumen pengaturan tata kerja bidang Sitel untuk kepentingan pengelolaan teknis yang disepakati oleh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Di antara hal-hal tersebut di atas sebagai upaya yang akan dilakukan ke depan, saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem baru mempunyai beberapa sistem informasi, di antaranya adalah:

- A. Website Kabupaten Karangasem dengan nama domain [www.karangasemkab.go.id](http://www.karangasemkab.go.id) yang merupakan langkah awal untuk sebuah sistem informasi berbasis web di tingkat Kabupaten. Ke depan, web ini akan terus disempurnakan dalam hal:
  1. Desain yang saling terkoneksi dari sisi data, baik sesama Kabupaten maupun antara Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi Bali. Di samping itu pula, diharapkan terjadi inter-operabilitas web OPD, yang merupakan web representatif dari setiap OPD yang saling terkoneksi berdasarkan aturan-aturan tertentu dan terhubung otomatis. Pada sisi manajemen *content*-nya, dipasang *tools* standarisasi data yang akan meng-*update* informasi. Format data terbagi atas sektor pembangunan, dan dapat dientry dari masing-masing OPD terkait, yang selanjutnya menjadi data pembangunan Kabupaten Karangasem.

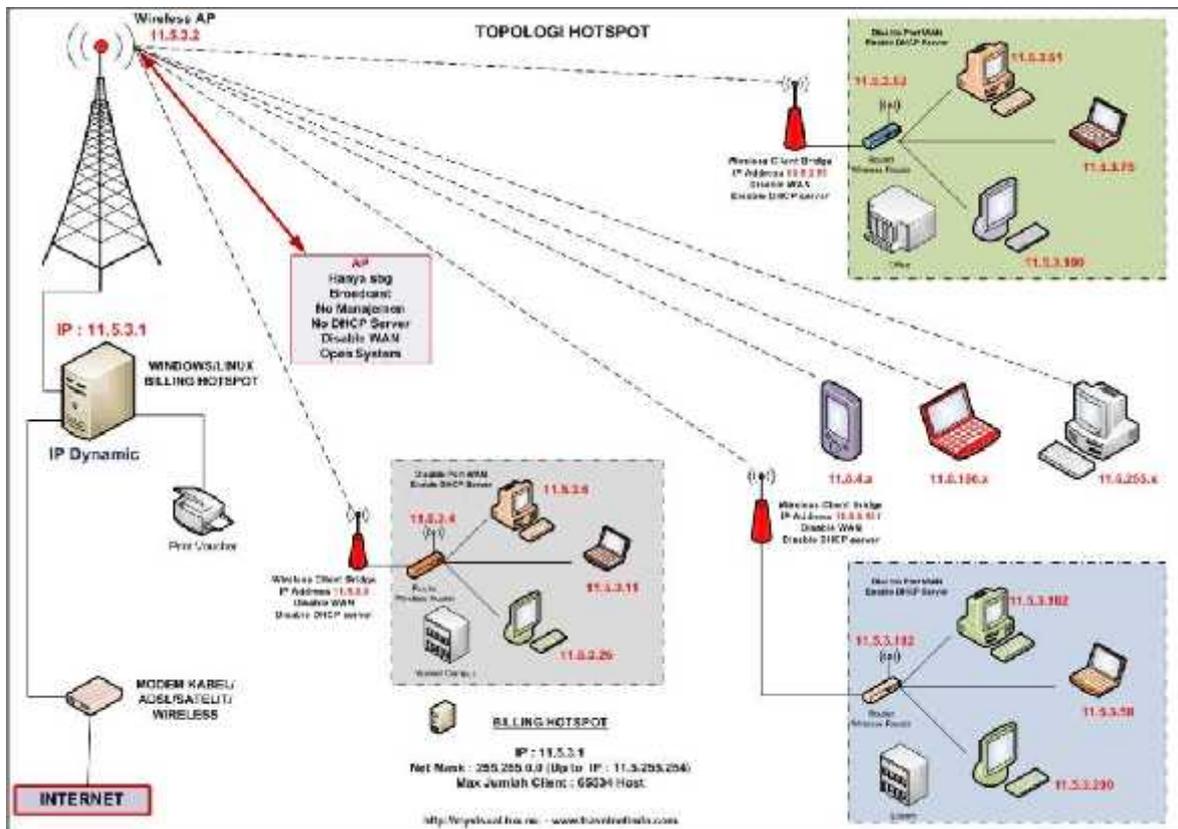
2. Pembangunan portal komunikasi, yang merupakan web representatif untuk berkomunikasi, koordinasi dan kolaborasi diantara aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Akan tetapi semua aplikasi di atas, sangat bergantung pada jaringan Infrastruktur SIMDA, agar seluruh OPD terhubung dengan jaringan infrastruktur SIMDA ini. Berikutnya, akan dilakukan penyesuaian metode komunikasi data pada jaringan Infrastruktur SIMDA untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Hotspot, yang menjangkau kurang lebih 200 meter. Hotspot itu adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi *Wireless LAN* pada lokasi-lokasi publik. Hotspot pertama kali digagas tahun 1993 oleh **Brett Steward**. Dengan pemanfaatan teknologi ini, individu dapat mengakses jaringan seperti internet melalui komputer atau laptop yang mereka miliki di lokasi-lokasi dimana hotspot disediakan. Hotspot juga merupakan sebuah titik yang memancarkan koneksi jaringan/internet melalui frekuensi tertentu yang apabila ditangkap oleh perangkat penerima pada sebuah komputer akan memungkinkan komputer tersebut terhubung ke jaringan/internet. Hotspot biasanya dipancarkan oleh sebuah perangkat *Wifi (Wireless Fidelity)* yang dapat digunakan secara efektif pada radius tertentu dari perangkat tersebut.

Pada tahun anggaran 2011 dan 2012, pengembangan jaringan hotspot juga telah dilaksanakan melalui penguatan hotspot di Sekretriari DPRD dan Sekretariat Daerah. Melalui pengembangan jaringan hotspot ini, diharapkan akses informasi melalui internet dapat dimanfaatkan oleh aparatur, masyarakat, maupun pengguna lainnya. Artinya perkembangan pembangunan hotspot ini adalah menunjang pelayanan komunikasi melalui internet, mengingat tuntutan perkembangan dan kebutuhan publik akan manfaat Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) semakin bertambah besar.. Adapun fungsi hotspot ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai titik akses ke jaringan komputer kantor yang menggunakan kabel
  - Mempermudah perluasan jaringan di tempat kerja (kantor)
  - Sensitifitas data harus diperhatikan
  - Sistem keamanan harus dirancang sebaik-baiknya
2. Sebagai titik akses ke jaringan internet
  - Menyediakan layanan gerbang menuju internet
  - Sebagai layanan tambahan (gratis) di café, restoran, hotel, pameran, dll.
  - Sebagai layanan khusus berbayar untuk umum dengan cakupan jaringan yang lebih luas

Berikut disajikan (dalam gambar) cara kerja hotspot.



Gambar: cara kerja hotspot (wireless lan)

## 2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Komunikasi dan informatika adalah konvergensi antara dua bidang yaitu pengembangan komunikasi dan informasi serta aplikasi penerapan teknologi informasi (IT). Telah disadari bahwa komunikasi dan informasi dalam peradaban bangsa saat ini sudah dibantu oleh berbagai kemajuan teknologi yang membantu informasi dan komunikasi secara cepat dan efektif. Dalam peningkatan kinerja SKPD, informasi dan komunikasi disalurkan dalam wadah lembaga sosial maupun lembaga pemerintah sebagai dua kutub yang berjalan secara sinergis. Informasi dan komunikasi yang padu akan mendorong dan membantu percepatan pelayanan pemerintahan. Pada sisi yang sama, pembangunan IT haruslah mendapat perhatian yang memadai. Lambat laun, gagasan untuk membangun pelayanan berbasis teknologi informasi akan tercipta.

Sampai saat ini, pembangunan informasi dan komunikasi serta pemanfaatan IT sudah terlihat ada peningkatan melalui berbagai program dan kegiatan. Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi pada masyarakat melalui wadah Kelompok Informasi Masyarakat. Wadah ini fungsinya terus meningkat sebagai penyalur, pengakses, penyaring informasi.
2. Terwujudnya media website pemerintah daerah yang berfungsi memberikan informasi secara elektronik sehubungan dengan kegiatan pemerintahan.
3. Terwujudnya penataan pembangunan sarana komunikasi seperti menara telekomunikasi yang keberadaannya memerlukan penataan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi menara telekomunikasi yang sampai saat ini terus dimonitoring oleh tim monitoring instansi terkait.
5. Terwujudnya desain pengembangan teknologi informasi melalui master plan teknologi informasi untuk membangun Kabupaten Karangasem pada bidang IT.

## **2.5 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD**

Pengembangan komunikasi dan informasi yang dibangun adalah pada pemangku kepentingan di tingkat birokrasi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Peluang ini cukup besar dan responsif karena masyarakat juga mengharapkan komunikasi dan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat.

Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sebagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, jelas bahwa IT adalah sudah familiar pada sebagian besar masyarakat. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunikasi dan informasi antara lain:

1. Sering terjadinya perubahan peraturan/pedoman penyelenggaraan komunikasi dan informatika terutama eksistensi lembaga yang membidangi komunikasi dan informatika.

2. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.

Dari berbagai tantangan yang terjadi terdapat solusi yang mungkin saja bisa meminimalisir semua tantangan yang terjadi di antaranya sebagai berikut.

1. Meningkatkan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam pelayanan komunikasi dan informatika sebagai tupoksi dinas, saat ini telah memasuki era reformasi. Masyarakat menuntut adanya keterbukaan/transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya menyangkut program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam program dan pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan *e-government*, sebagaimana diwujudkan pada **Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government**. Bahwa setiap pimpinan lembaga negara, kepala daerah diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya guna terlaksananya pengembangan *e-Gov*. Pembangunan *e-Government* ini lebih dipertegas dalam Konferensi Tingkat Tinggi Masyarakat Informasi Global (*World Summit on The Information Society / WSIS*) yang diselenggarakan pada tahun 2005 dengan target dapat membangun infrastruktur dasar untuk mengkoneksikan seluruh Desa, Sekolah, Perguruan Tinggi & pelayanan kesehatan serta 50% penduduk dunia sudah terjangkau ICT pada tahun 2015 .

Berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003, pengembangan *e-Gov* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup beberapa aktivitas yaitu (1) pengolahan data, (2) pengelolaan informasi, (3) sistem manajemen, dan (4) proses kerja. Berdasarkan perjalanan Dinas Komunikasi dan Informatika selama ini, tantangan utama pengembangan *e-Gov* adalah kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelakunya. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah infrastruktur komunikasi data dan informasi, infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.

Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (*internet, electronic data interchange & e-mail*). Pelaksanaan *e-procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai dasar hukum yang mendukung pengembangan *e-Government* adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Sehubungan dengan pengembangan *e-Government*, langkah awal yang dilaksanakan adalah memfasilitasi akses informasi elektronik berupa website pemerintah daerah. Saat ini, website pemkab Karangasem sudah dapat digunakan dan diakses oleh pengguna yang manfaatnya sudah dapat dirasakan secara signifikan. Berbagai konten dan *design* tiap saat tentu memerlukan pembaharuan sehingga kandungan berita di dalamnya tetap *ter-update*. Masyarakat sudah dapat memanfaatkan website pemkab Karangasem saat ini dengan alamat [www.karangasemkab.go.id](http://www.karangasemkab.go.id)

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang informasi, kegiatan informasi keliling juga masih sangat relevan dan rutin dilaksanakan. Tatap muka berupa dialog interaktif melalui radio, pertemuan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang ada pada setiap kecamatan juga mendapat prioritas yang tetap dilaksanakan. Selanjutnya, dalam perkembangan global dan peradaban yang semakin maju, dampak informasi begitu penting sebagai dasar dalam bertindak. Siapa yang cepat menerima informasi maka ia akan lebih dulu bisa bertindak. Dalam media akses informasi, media center yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan sarana bagi pengunjung dalam mengakses informasi. Melalui hotspot yang tersedia, para pengunjung dapat memanfaatkannya walaupun dalam penggunaannya terhalang oleh kapasitas pemakai yang menyebabkan daya akses sedikit lambat.

Berdasarkan atas telaah kebutuhan informasi dan komunikasi berbasis elektronik seperti di atas, kiranya berbagai hambatan yang timbul di antaranya adalah konsistensi perhatian terhadap sumber daya. Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sumber daya komunikasi dan

informatika. Sumber daya aparatur diusahakan dengan penempatan kapasitas sesuai dengan bidang dan kualifikasi pendidikan. Pengembangan daya dukung anggaran diusahakan dengan usulan dan lobi kepada pengambil kebijakan yang pada akhirnya bermuara pada optimalisasi komunikasi dan informatika bagi kepentingan publik.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2011-2015 adalah ” **Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II** ” Visi ini diambil dengan melihat segala potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, ciri kearifan lokal yang ada. Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut.

*Jagadhita* artinya kesejahteraan dunia; bahwa pembangunan yang ingin dihasilkan adalah kondisi masyarakat yang damai dan sejahtera. *Ya Ca Iti Dharma* artinya bahwa dasar filosofi yang dijadikan kerangka di dalam melaksanakan pembangunan adalah nilai-nilai kebenaran universal secara agama dan berdasarkan atas hukum positif. *Periode II* artinya bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tidak bisa instan selalu mengalami proses waktu atau periode. Untuk itu, guna melanjutkan visi yang terdahulu perlu berkelanjutan sehingga tujuan menjadi optimal.

Batasan-batasan:

1. Batasan sejahtera yaitu adanya penurunan secara signifikan terhadap angka kemiskinan secara bertahap dan komprehensif.
2. Nilai-nilai kebenaran terminologi agama yang dijadikan acuan secara khusus adalah Agama Hindu dengan nafas budaya Bali dan Undang-Undang Negara, (*dikutif dari renstra Bappeda Kabupaten Karangasem*).

**Misi** RPJMD Kabupaten Karangasem 2011-2015 yang merupakan tujuan kedua dari RPJPD Kabupaten Karangasem 2006-2025 adalah dalam rangka membuat Karangasem ke depan menjadi lebih baik dengan mencermati isu-isu strategis, baik yang bersifat internal (kekuatan dan kelemahan) maupun bersifat eksternal (peluang dan tantangan). Globalisasi dalam pasar bebas merupakan peluang bagi sumber daya manusia Karangasem untuk dapat berkiprah, baik di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat global. Globalisasi merupakan peluang untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menurunkan tingkat pengangguran.

Dalam rangka mewujudkan ” *Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II* ” akan dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan peran sektor pertanian, memantapkan pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, mengembangkan industri kecil dan industri menengah lainnya, serta memperkuat lembaga tradisional kemasyarakatan, mewujudkan ketentraman, kedamaian serta kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki, untuk menuju “*Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*” maka rumusan Misi Kabupaten Karangasem dalam pencapaian Visi Karangasem 2011-2015 ditetapkan dalam 3 Misi yaitu:

**Misi Pertama : Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN**

**Misi Kedua : Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan**

**Misi Ketiga : Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan**

**Tujuan dan Sasaran.** Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan untuk menuju “*Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II*” dapat dijabarkan dalam tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Karangasem di bawah ini.

<b>VISI</b>	<b>:</b>	<b>Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma Periode II</b>		
<b>MISI I</b>	<b>:</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Bebas KKN</b>		
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	
Tujuan	:	Mengoptimalkan pelayanan, pendayagunaan aparatur dan peningkatan kompetensi aparatur, pendayagunaan organisasi dan sistem, fasilitasi antar stakeholders, demokratisasi pelaksanaan aturan perundangan negara.	1	Optimalisasi pelayanan
			2	Pendayagunaan dan peningkatan kompetensi aparatur
			3	Pendayagunaan organisasi dan sistem
			4	Fasilitasi antar stakeholders
			5	Demokratisasi
			6	Pelaksanaan aturan perundangan negara

<b>MISI II</b>	:	<b>Peningkatan dan Penyelarasan Pembangunan</b>		
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	
Tujuan	:	Mewujudkan pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan, peningkatan investasi berwawasan lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang bertanggung jawab, peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang serta menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik.	1	Pendayagunaan potensi dan pemanfaatan SDA berkelanjutan
			2	Peningkatan investasi berwawasan lingkungan
			3	Pemberdayaan masyarakat bertanggung jawab
			4	Peningkatan dan penyelarasan pembangunan di segala bidang
			5	Menjaga kelestarian lingkungan fisik dan non fisik
<b>MISI III</b>	:	<b>Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan</b>		
		<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	
Tujuan	:	Pengurangan jumlah RT miskin secara bertahap dan komprehensif, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, adanya jalinan kemitraan strategis dengan stakeholders sampai tingkat kecamatan, serta menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya tradisional.	1	Pengentasan kemiskinan bertahap dan komprehensif
			2	Kesejahteraan sosial
			3	Mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT
			4	Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholders
			5	Menjaga keamanan dan ketertiban sosial, pelestarian nilai-nilai budaya bali

Berdasarkan atas sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem yang terkait dengan sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

- a. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi I RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Bebas KKN) pada sasaran demokratisasi diarahkan pada meningkatnya penyebaran informasi untuk mencapai keterbukaan informasi publik. Sasaran RPJMD ini dilaksanakan melalui pembentukan lembaga KIM di seluruh

desa/kelurahan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka KIM difungsikan untuk memfasilitasi masyarakat untuk dapat menyerap keterbukaan informasi. Selanjutnya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik, telah dibentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap SKPD sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

b. Arah kebijakan pembangunan untuk melaksanakan misi III RPJMD (Penyelenggaraan Tugas Fungsi Sosial Kemasyarakatan) pada sasaran mencerdaskan kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan IT diarahkan pada:

a. Meningkatnya sistem jaringan di semua SKPD untuk menciptakan proses perencanaan dan evaluasi pembangunan secara koneksitas.

Sasaran RPJMD ini sinergis dengan sasaran yang ada pada renstra Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu meningkatnya pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Sasaran ini ditujukan mengukur kemajuan salah satu indikator dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang difasilitasi dengan pemberdayaan teknologi informasi khususnya pemanfaatan akses internet. Model yang dikembangkan adalah perluasan jangkauan hotspot sehingga memudahkan dan melancarkan akses internet bagi pemakai hotspot bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Perluasan jangkauan hotspot ini dimaksudkan untuk memfasilitasi SKPD dalam mengakses kebutuhan informasi, mempermudah akses komunikasi, fasilitas peningkatan kapasitas kerja, pengiriman data *online*, dan sebagainya. Di samping kebutuhan di lingkungan instansi pemerintah, fungsi hotspot juga dapat difungsikan oleh masyarakat luas yang bisa memanfaatkan hotspot area untuk mengakses informasi.

b. Peningkatan pemakaian media internet yang lebih luas di masyarakat.

Realisasi sasaran ini diwujudkan dalam sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu sasaran meningkatnya masyarakat yang terjangkau layanan telekomunikasi. Untuk konsumsi akses internet pada seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem, sudah dilakukan melalui penyediaan fasilitas akses internet melalui sarana menara telekomunikasi yang tersebar di 8 kecamatan.

Perluasan jangkauan internet di masyarakat juga telah dilakukan melalui kegiatan layanan internet kecamatan. Sasarannya adalah kantor kecamatan maupun sekolah-sekolah. M-PLIK merupakan salah satu wujud implementasi dari program "Pusat Layanan Jasa Akses Internet Kecamatan KPU/USO". M-PLIK dicanangkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, serta

dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Sejalan dengan pemerataan akses internet di Kabupaten Karangasem, maka layanan internet melalui M-PLIK diharapkan dapat meningkatkan dan memotivasi masyarakat dan pengguna internet untuk belajar berinternet, cara internet sehat, dan bisa mengakses informasi di dunia maya.

### **3.3 Isu-Isu Strategis Yang Menjadi Tantangan Tugas Pokok dan Fungsi**

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem ke depan, yang menonjol lebih menitikberatkan pada peran teknologi dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Melalui peran teknologi, maka tiga hal pilar penting dalam pembangunan reformasi yakni **transparansi**, **akuntabilitas**, dan **efektifitas** dapat tercapai. Dengan pendekatan ilmiah dan logis (teknokratik) maka dapat disimpulkan beberapa isu strategis dimaksud adalah sebagai berikut.

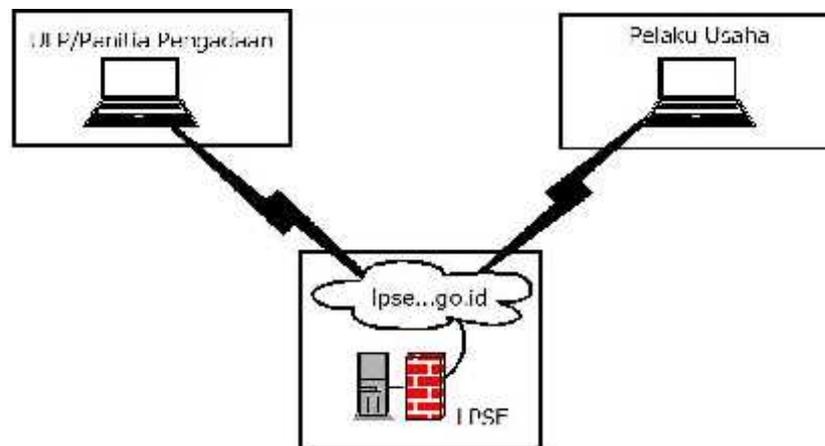
#### **1. Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik**

Saat ini, pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Di samping itu, haruslah lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi.

Bahwa mengingat lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan permasalahan lintas institusi dan lintas sektor yang memiliki dampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membentuk sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada awalnya merupakan

sistem *e-procurement* (pengadaan secara elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Sistem LPSE dikembangkan dengan basis *free license* untuk diterapkan seluruh instansi pemerintah di Indonesia.

Pada perkembangan selanjutnya, LPSE didefinisikan sebagai unit pelaksana yang memfasilitasi Panitia/Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sendiri mengoperasikan sistem *e-procurement* bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP. Namun secara umum, LPSE diartikan sebagai sistem *e-procurement* termasuk di dalamnya aplikasi dan unit pelaksana.



Dasar hukum LPSE adalah Perpres Nomor 54 tahun 2010 pasal 111 yang menyatakan bahwa (1) gubernur/bupati/walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik; (2) kementerian/lembaga/instansi dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan PBJ secara elektronik.

Adapun pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik tujuannya adalah untuk:

- (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- (2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- (3) memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- (4) mendukung proses monitoring dan audit;
- (5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

## **2. Satu data untuk Kabupaten Karangasem**

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

## **3. Layanan pemerintahan berbasis layanan online**

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK

## **4. Manajemen perkantoran yang paperless**

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja.

## **5. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata**

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

## **6. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian cepat**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa akses yang kurang baik bagi masyarakat.

## **7. Tingkat apresiasi publik terhadap pembangunan daerah yang begitu besar**

Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin mengemuka, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

## **8. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.**

Keberadaan SITEL pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengoptimalkan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

## **9. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika**

Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

### 3.4 Kajian Berdasarkan Analisis SWOT

Untuk mencapai sasaran berdasarkan analisis SWOT, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut.

#### 1. Asumsi

Sesuai dengan isu-isu tersebut di atas, maka digunakan beberapa asumsi yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar; landasan berpikir karena dianggap benar (mengasumsikan=menduga; memperkirakan; memperhitungkan; meramalkan). Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Beberapa asumsi yang digunakan untuk meyakinkan tercapainya sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1. Renstra Dinas Komunikasi mendapat dukungan dan komitmen penuh dari seluruh SKPD.
2. SDM akan mendapat perhatian dan disediakan terutama yang mempunyai kemampuan IT.
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Stakeholder dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam mengembangkan komunikasi informasi berbasis elektronik.
6. Sejalan dengan regulasi pengembangan IT, maka anggaran akan didukung dalam jumlah yang cukup.

#### 2. Identifikasi Faktor Strategi

Dalam pencapaian visi dan misi Diskominfo, maka dilakukan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik **strengths, weaknesses, opportunities**, dan **threats** atau lebih dikenal dengan nama

Analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan adalah mengidentifikasi beberapa hal yaitu untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

**a. Identifikasi Faktor Strategi Internal**

**Kekuatan (strengths).** Kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40).
3. Fasilitas pendukung informatika yang relatif memadai.
4. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika.

**Kelemahan (weaknesses).** Faktor-faktor kelemahan yang menjadi perhatian adalah:

1. Terbatasnya SDM yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang informatika.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Terbatasnya kemampuan pegawai dalam pengelolaan kegiatan sehingga hasilnya belum dapat diharapkan secara maksimal.

**b. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal**

**Peluang (opportunities)**

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Perkembangan IPTEK yang pesat dan mendukung kemajuan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
2. Terjalannya koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika.
4. Kondisi Kabupaten Karangasem yang kondusif.

**Tantangan (threats).** Tantangan yang mesti diantisipasi adalah:

1. Masih adanya intervensi politik dalam penetapan kebijakan pembangunan.
2. Kurangnya perhatian terhadap kebijakan pembangunan Teknologi Informasi.

### **3. Analisis**

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif-alternatif strategi Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengelompokan sebagai berikut.

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman.
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari keempat penerapan strategi tersebut, maka terdapat beberapa kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai yaitu (a) adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta (b) adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem pada dasarnya mengikuti visi Pemerintah Kabupaten Karangasem yaitu "**Mewujudkan Karangasem Jagadhita Ya Ca Iti Dharma**". Penetapan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem disamping harus berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga harus merujuk pada **tugas pokok dinas** yaitu "**Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Perbantuan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika**". Dalam kurun waktu 2011-2015, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem diharapkan mampu mendukung pelaksanaan akselerasi pembangunan daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011–2015.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem telah mengantisipasinya dengan menetapkan visi:

**Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika menuju Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca iti Dharma**

#### 4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai berikut.

**1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal**

Dalam mewujudkan diseminasi informasi kepada publik, lembaga-lembaga komunikasi baik lembaga komunikasi pemerintah maupun lembaga komunikasi yang ada di masyarakat mempunyai fungsi yang signifikan. Diseminasi informasi (*dissemination* = penyebaran)

adalah ruang ketika informasi diolah, disaring, dan diterima yang akan membawa pengaruh dan dampak positif bagi perkembangan bangsa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Formulasi ini juga mengandung muatan bahwa di samping pendayagunaan lembaga komunikasi dalam menyebarkan informasi, maka pengaruh kearifan lokal yang melahirkan karya sosio kultural seperti seni tradisional dalam bentuk wayang, topeng bondres, drama tari, dan seni pertunjukan lainnya juga sangat bermanfaat. Landasan tatwa dalam falsafah Hindu khususnya adalah formulasi dari kebenaran agama, kesucian, dan dimensi kesenian. Oleh sebab itu, daya estetik dan narasi dalam seni pertunjukan sangat efektif diselipkan pesan-pesan informasi.

Khusus untuk lembaga komunikasi, saat ini kemitraan dengan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat juga sangat berperan untuk diseminasi informasi. Keberadaan KIM dijamin berfungsi efektif karena sebagai organisasi swadaya yang bersifat ekonomis melibatkan anggota-anggota masyarakat. Dalam perkembangannya, sudah tentu KIM membutuhkan pembinaan secara berkesinambungan untuk mengarahkan dan menumbuhkan potensi yang ada di dalamnya.

Di samping KIM, pada instansi pemerintah saat ini juga ada PPID yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan **Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**. Berdasarkan aturan hukum ini, transparansi informasi adalah sesuatu yang wajib sepanjang menjunjung harkat dan martabat serta demi kemajuan bangsa.

## **2. Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT**

Misi ini menekankan pada pemanfaatan teknologi informasi (ICT) untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Saat kemajuan peradaban global yang ditengarai oleh ilmu pengetahuan yang semakin maju, daya saing bangsa berbasis penguasaan teknologi menjadi keharusan yang tidak bisa dihindari. Maka lahirlah istilah *good government /good governance* bersandarkan penguasaan IT. *Information of technology (IT)* pada dasarnya adalah penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras (*software* dan *hardware*) untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi serta pemenuhan kebutuhan lainnya. Khusus yang berhubungan dengan fungsi pemerintahan, perangkat teknologi yang mendesak dimatangkan adalah penyediaan

infrastruktur TI memadai yang diikuti pula dengan penggunaan beragam aplikasi. Hal ini tidak akan bisa berjalan dan bisa dimanfaatkan terutama dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan pemberian layanan jika tidak diimbangi pula dengan peningkatan sumber daya manusia yang bisa menguasai dan menggunakan teknologi. Maka pelatihan teknologi informasi penting diberikan bagi segenap aparatur pemerintah.

### **3. Mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Misi ini mengandung dua tujuan yaitu pengembangan jasa pelayanan pos perdesaan serta pengembangan potensi dan jasa usaha telekomunikasi yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah. Pentingnya pengelolaan pos perdesaan adalah seperti pebentukan dan pengelolaan jasa usaha titipan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Dalam aktivitas transportasi yang tidak hanya manusia, maka pengamanan dan penitipan barang layak pula mendapat pelayanan yang maksimal. Selanjutnya dalam mendukung pelayanan dan akses komunikasi bagi pemerintah dan masyarakat, saat ini menara telekomunikasi sangat vital keberadaannya. Disamping pola penataannya yang bisa mengganggu kenyamanan, keamanan, dan estetika berdasarkan tata ruang, keberadaan menara telekomunikasi juga sangat bermanfaat sebagai sarana penunjang pelaksanaan komunikasi serta berdampak ekonomis bagi pendapatan asli daerah. Dengan demikian, jasa usaha telekomunikasi perlu dikembangkan secara positif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan, yang mengacu pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

## **A. Tujuan**

Adapun tujuan misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif.
2. Meningkatnya sumber daya dan aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
3. Meningkatnya fungsi pos telekomunikasi sebagai media jasa telekomunikasi.

## **B. Sasaran**

Sasaran misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif.
2. Meningkatnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.
3. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi.
4. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika
5. Meningkatnya infrastruktur layanan telekomunikasi
6. Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien.

### **4.4 Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh SKPD. Strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut.

#### **Misi Kesatu**

**Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal**

- Strategi** : Melaksanakan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya  
Meningkatkan penyediaan layanan informasi dan dokumentasi pada setiap SKPD  
Meningkatkan pemberdayaan dan potensi kesenian rakyat sebagai sarana pengembangan dan penyebaran informasi  
Menjadikan radio sebagai fasilitasi akses informasi edukatif kepada masyarakat  
Melakukan editing informasi yang layak dan berguna bagi masyarakat  
Meningkatkan keterlibatan peran lembaga komunikasi, partai politik, pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang perjuangan bangsa
- Kebijakan** : Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan kepada lembaga informasi pada masyarakat  
Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi  
Melaksanakan diseminasi informasi edukatif kepada masyarakat perdesaan  
Melaksanakan edukasi informasi secara komprehensif dan timbal balik
- Tujuan** : Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif
- Sasaran** : Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif.  
Meningkatnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.

### **Misi Kedua**

**Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT**

- Strategi** : Menyiapkan infrastruktur fasilitas jaringan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Menyiapkan infrastruktur LPSE

Membuat pemetaan terhadap daerah atau lokasi yang ada fasilitas internet

Mengembangkan SDM di bidang komunikasi dan informatika

Kebijakan : Mengembangkan fasilitas LAN dan Hotspot

Mengembangkan sistem informasi melalui website pemerintah daerah

Meningkatkan pelatihan pengelolaan LPSE

Memfasilitasi pengoperasian Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan

Tujuan : Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT

Sasaran : Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi

Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika

### **Misi Ketiga**

**Mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Strategi : Membuat pemetaan menara telekomunikasi di setiap daerah/kecamatan

Pemetaan area blankspot (belum terdeteksinya sinyal radio) pada seluruh wilayah

Menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos

Kebijakan : Membuat produk hukum yang memuat tindakan keabsahan pemerintah yang mengatur wewenang, prosedur, dan substansi pengaturan dan pengendalian menara telekomunikasi

Menyiapkan dan menambah infrastruktur radio pancar ulang

Memberikan prioritas pemahaman pos bagi desa tertinggal dan terpencil

Tujuan : Meningkatnya fungsi pos telekomunikasi sebagai media jasa telekomunikasi

Sasaran : Meningkatnya infrastruktur layanan telekomunikasi

Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien

#### **4.5 Indikator Kinerja Utama**

Pada setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari sasaran dan tujuan dari struktur organisasi serta merupakan indikator yang paling menentukan, bersifat strategis, dan dipilih dari sekian banyak indikator pada suatu organisasi. Landasan hukum indikator kinerja utama adalah PERMENPAN No. PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Fungsi indikator kinerja utama di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait.
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja.
- d. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik;
- e. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Reviu indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2013 adalah sebagai berikut.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2014
1	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelembagaan KIM	100%
		Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	360 orang
		Persentase desa yang dilayani informasi melalui media kesenian rakyat	38,46%
		Persentase informasi yang disiarkan melalui dialog radio dan pesan layanan informasi	35,58%
		Jumlah majalah informasi yang disebarakan	215 eks
2	Meningkatnya sumber daya dan aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik	Persentase pengembangan jaringan hotspot pada SKPD	22,22%
		Persentase pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	83,33%
		Persentase lokasi (desa/sekolah) yang dilayani MPLIK	34,72%
		Jumlah SDM yang dilatih IT	128 orang
3	Meningkatnya fungsi pos perdesaan dan menara telekomunikasi sebagai media jasa telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang memberikan akses telekomunikasi	91 menara

## BAB V

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

#### 5.1. Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah ( *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (13)*). Program kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Dengan kata lain, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan SKPD. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Selanjutnya dalam penjabaran kegiatan harus memiliki tolak ukur yang jelas yang dirumuskan dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, *output, outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Program terdiri atas beberapa kegiatan yang merupakan kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat serta kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika merumuskan beberapa program dalam rencana strategis 2011-2015 sebagai berikut.

#### 1. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Program ini merupakan wujud dari misi meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan

komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal. Untuk penyerapan informasi terutama segala pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten Karangasem, cara yang harus dilaksanakan adalah melalui pengembangan dan tumbuhnya lembaga-lembaga informasi pada masyarakat di setiap desa/kelurahan pada 8 kecamatan di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, maka dibentuk kemitraan dengan kelompok informasi masyarakat (KIM) sebagai lembaga informasi yang ada pada setiap desa/kelurahan.

Di samping pengoptimalan fungsi lembaga-lembaga informasi, program ini dilaksanakan juga melalui fasilitasi pengembangan jaringan teknologi, penyediaan sistem informasi berupa website, dan pemberian sosialisasi layanan internet bagi masyarakat. Bahwa sejalan dengan kemajuan informasi yang tidak saja berupa hard copy, informasi di dunia maya saat ini sangat besar membawa pengaruh dan dampak karena kecepatan mobilitasnya. Untuk penyediaan jaringan, sudah dilakukan dengan melaksanakan pemasangan hotspot pada beberapa SKPD/unit kerja yang juga bisa diakses oleh masyarakat. Hal ini juga dilakukan sejalan dengan penyediaan website pemerintah daerah sebagai domain ranah informasi yang terbuka bagi publik.

## **2. Kerjasama Informasi dengan Mass Media**

Program ini dilaksanakan dengan memberdayakan pelayanan informasi dan dokumentasi, penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui kesenian rakyat, pelaksanaan dialog radio dan pesan layanan informasi melalui radio, cetak dan penyebaran majalah informasi, serta sarasehan informasi. Sejalan dengan era informasi yang dipayungi oleh keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, maka setiap badan publik wajib memberikan pelayanan informasi kepada pengguna. Sehubungan dengan masin terjadi kesenjangan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten Karangsem kepada masyarakat, maka pemberian informasi salah satunya dilakukan dengan cara jemput bola. Penggunaan media kesenian rakyat sebagai media yang erat kaitannya dengan wujud budaya dan agama sangat tepat sebagai sarana penyebaran informasi. Pemberian informasi melalui media kesenian rakyat dirasakan cukup efektif karena memberikan ruang komunikasi yang timbal balik. Sarana lainnya yang juga digunakan adalah penyebaran majalah informasi yang memuat informasi penyampaian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi, dari kualitas isi tentu harus ditingkatkan baik dari segi urgensi informasi, relevansi informasi dengan keadaan masyarakat, maupun peningkatan kuantitas informasi.

### 3. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik melalui LPSE Kabupaten Karangasem merupakan perwujudan dari tekad untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperkuat Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2012 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Bahwa dengan pelaksanaan pengadaan melalui LPSE, akan menimbulkan efek positif berupa pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, terbuka, kompetitif yang akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika dirinci lebih jauh ada beberapa manfaat yang bisa dipetik melalui LPSE. Manfaat **pertama** adalah, menyetatkan proses demokratisasi dengan akuntabilitas dan transparansi. Melalui LPSE masyarakat bisa melihat, ikut serta sebagai penyedia, ataupun mengawasi akuntabilitas proses jalannya pengadaan barang/jasa pemerintah, karena semuanya tercatat secara elektronik. **Kedua**, efektifitas yang lebih baik dan mudah dibandingkan melakukan pelelangan secara manual. **Ketiga** adalah efisiensi atau penghematan anggaran yang lebih baik. Rata-rata efisiensi setelah menggunakan *e-proc* atau pengadaan secara elektronik secara nasional sekarang adalah 12%. Melalui penerapan *e-procurement*, sistem pengadaan akan berubah dan semakin kondusif sehingga kinerja semakin meningkat serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas, persaingan sehat, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan APBD yang pada akhirnya *good governance* dan efisiensi anggaran dapat tercapai.

Kini penerapan *electronic government (e-Gov)* yang salah satunya LPSE, merupakan salah satu juga upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguntungkan kelompok usaha kecil dan menengah. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, LPSE juga meningkatkan iklim kompetisi yang sehat dan kemudahan akses bagi seluruh *stakeholder* untuk mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP). Dibandingkan dengan sistem pengadaan barang/jasa yang manual, pengusaha kecil dan menengah mempunyai peluang lebih untuk mengikuti PB/JP melalui LPSE. Kelompok usaha kecil dan menengah dapat melihat pengumuman dari website dan memasukkan penawaran melalui wartel atau warnet, sehingga menjangkau banyak tempat karena dapat dilakukan dari mana saja.

### 4. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Program ini dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan pekerjaan dan peningkatan kinerja birokrasi. Pada dasarnya, pelatihan sumber daya manusia di bidang IT

adalah implementasi dari harapan untuk mewujudkan *elektronik government* di Indonesia sesuai dengan beberapa peraturan; (1) Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, (2) KEPMENPAN No. 63 th 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Percepatan pembangunan dan aplikasi teknologi informasi yang diawali dengan pelatihan kemampuan IT akan berdampak pada peningkatan kinerja, efisiensi waktu, efektifitas pelayanan kepada publik, dan penyediaan satu data.

## **5. Pengembangan Pos dan Telekomunikasi**

Program ini merupakan pengembangan misi mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor usaha jasa telekomunikasi, menara telekomunikasi berfungsi sebagai fasilitas komunikasi melalui telepon selular yang keberadaannya terus dimonitoring tim dari instansi terkait. Sesuai dengan geografis wilayah, di Kabupaten Karangasem sampai saat ini terdapat 51 titik zona menara. Hal ini disesuaikan dengan keberadaan *zona existing* yang ditetapkan. Keadaan wilayah yang memiliki pegunungan dan perbukitan pada setiap daerah akan berpengaruh pada semakin banyaknya *zona existing* yang ditetapkan. Zona existing merupakan titik yang ada pada suatu wilayah yang memungkinkan dibangunnya menara telekomunikasi. Penetapan *zona existing* ini sejalan dengan usaha pemerintah untuk mengatur keberadaan menara yang semakin hari terus menjamur, dan jika dibiarkan maka hal ini akan merusak tata ruang suatu wilayah. Selanjutnya dikeluarkanlah **Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2009 yang mengatur tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara**. Melalui pembangunan menara bersama, memungkinkan para operator untuk memasang BTS-nya dalam satu menara. Sampai saat ini perkembangan menara telekomunikasi yang ada di Kabupaten Karangasem sebanyak 85 buah yang tersebar pada 8 kecamatan.

Sebagai tindak lanjut peraturan dari pusat, maka keberadaan menara juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama yang diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama. Sebagai tindak lanjut dalam penetapan retribusi daerah terhadap

keberadaan menara telekomunikasi, maka ditetapkan Perda Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam pengendalian menara telekomunikasi, juga telah dibentuk Tim Monitoring, Pengawasan, dan Pengendalian Pembangunan Usaha Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Karangasem berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113/HK/2012.

## **5.2 Kegiatan dan Indikator**

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi semua jenis sumber daya tersebut (*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)*). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi-misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program prioritas dan kegiatan-kegiatan pembangunan serta indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2011-2015. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merumuskan sejumlah kegiatan dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Rencana Strategis tahun 2011-2015. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

### **1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi**

Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi difungsikan untuk pengembangan akses informasi berbasis IT baik bagi instansi pemerintah maupun masyarakat. Tahap pertama yang dilakukan adalah mengadakan pemasangan jaringan LAN pada kantor tempat kerja khususnya jaringan masing-masing PC sehingga memudahkan koneksitas data. Koneksitas data ini memungkinkan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan khususnya pada kantor yang tersekat-sekat oleh ruangan kerja. Koneksitas data ini tentu harus didukung dengan kemampuan untuk menangkal bahaya penyebaran virus komputer. Di samping LAN, jaringan juga dikembangkan dengan perluasan *hotspot area* bagi SKPD/unit kerja yang ada di sekitar kantor. Perluasan jaringan ini akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Melalui kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam kerangka fasilitasi akses ke dunia maya. Indikator kegiatan ini adalah : % pengembangan jaringan hotspot pada SKPD.

## **2. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi**

Sehubungan dengan masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap internet, maka pemerintah pusat membuat suatu kebijakan melalui pemberian layanan internet kecamatan. Kegiatan ini diharapkan sangat membantu untuk penyuksesan Indonesia yang *good governance* atau sistem pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pada era teknologi tidak diharapkan lagi masyarakat gagap teknologi apalagi kemajuan teknologi saat ini terus berkembang yang berdampak pada kemudahan pada segala bidang. Manfaat MPLIK diantaranya adalah membuka wawasan masyarakat dalam melihat dunia khususnya melalui internet, meningkatkan wawasan percepatan layanan bidang masyarakat, misalnya pembuatan KTP/KK secara elektronik, pembayaran PLN *online*, dan melakukan penyuluhan dan pelatihan masyarakat secara interaktif dengan video. Indikator kegiatan ini adalah % lokasi/desa yang dilayani MPLIK.

## **3. Biaya jasa pemeliharaan repeater**

Kegiatan ini merupakan wujud dari sasaran meningkatnya infrastruktur layanan telekomunikasi dengan indikator kinerja jumlah repeater yang terpelihara. Yang dimaksud dengan repeater atau RPU adalah salah satu cara mempermudah orang berkomunikasi dengan menggunakan alat bantu HT sehingga komunikasi dari dua arah akan terjalin tanpa menggunakan perangkat tambahan pada HT. Saat ini, jumlah repeater di Kabupaten Karangasem adalah 3 repeater. Pancaran suatu alat komunikasi seperti HT hanya berjarak kurang lebih 7 km saja dan itu juga tergantung dari posisi pemancar berada. Dengan demikian, maka perlu dipasang RPU lagi sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Lokasi yang dipilih untuk pemasangan RPU adalah di dekat pelabuhan Padang Bai. Hal ini telah dipertimbangkan bahwa pancaran RPU di tempat dimaksud berada pada posisi yang sangat baik. Pembuatan RPU (radio pancar ulang) di Padang Bai memiliki komponen-komponen di antaranya radio pancar dan radio penerima, 2 antene, accu+carger, kabel kabel dan juga tower. Agar lebih aman dari bahaya petir maka perlu ditambah pengaman. Kegunaan radio pancar ulang lainnya membantu komunikasi daerah tertentu saat kondisi HP sudah tidak memungkinkan. Maka pesawat HT yang mulai berperan karena RPU juga sebagai pembantu dalam memancarkan setiap informasi.

## **4. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah.**

Kegiatan ini adalah wujud dari sasaran tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif dengan indikator sasaran persentase desa/kelurahan yang telah membentuk KIM.

Sebagai lembaga informasi sosial, keberadaan KIM yang berada di masyarakat sampai saat ini diharapkan masih tetap merupakan ujung tombak penyerap, penyaring, dan penyebar informasi. Dalam relevansinya dengan penyelenggaraan pembangunan daerah yang saat ini berada dalam perkembangan teknologi informasi, maka disamping sebagai lembaga informasi sosial, eksistensi KIM juga diharapkan dapat menjadi patner pemerintah daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan perhatian yang timbal balik dari pemerintah kepada lembaga-lembaga KIM yang ada. Mengingat KIM sebagai lembaga atau organisasi yang mempunyai manajemen tersendiri, maka faktor yang penting dilakukan adalah pembinaan dan penguatan organisasi. Sumber daya manusia yang handal tidaklah cukup jika tidak ditunjang oleh faktor finansial sehingga misi KIM sebagai lembaga informasi yang sinergis dengan pelaksanaan pembangunan daerah benar-benar dapat terwujud.

## 5. Pemeliharaan dan Pengembangan Website

Pemeliharaan website pemkab Karangasem diarahkan pada pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dipelihara menyangkut pembenahan desain dan penyajian isi di dalamnya. Berita yang disajikan dalam berbagai hal, terbaru, dan relevan didesain agar bermanfaat dengan akses yang cepat. Untuk tahun ini, kebutuhan pemeliharaan ditarget 2 unit website yaitu website pemkab dan subdomain web Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk subdomain lainnya ke depan akan diarahkan pada penyeragaman domain website sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada perkembangannya, fungsi website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Seperti telah di jelaskan dalam **Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government**, yang berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu, melalui adanya pemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs *web* di internet adalah isi (*content*) dan desain yang baik serta menarik. Sebuah situs *web* pemerintah

daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi dan mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai apa yang seharusnya ada di situs *web*.

## **6. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik**

Lelang melalui (LPSE) merupakan strategi jitu mencegah KKN. Iklim pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin kondusif seiring penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Melalui penerapan *e-procurement* sistem pengadaan akan berubah dan semakin kondusif sehingga kinerja semakin meningkat serta terciptanya transparansi dan akuntabilitas, persaingan sehat, sekaligus mendukung percepatan pelaksanaan APBD. Kini penerapan *electronic government* (e-Gov) yang salah satunya LPSE, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menguntungkan kelompok usaha kecil dan menengah. Selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas, LPSE juga meningkatkan iklim kompetisi yang sehat dan kemudahan akses bagi seluruh *stakeholder* untuk mengikuti pengadaan barang/jasa Pemerintah (PB/JP). Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui *e-proc*.

## **7. Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi**

Pemanfaatan TIK pada setiap penyelenggaraan pemerintahan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka pengelolaan data, mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran informasi secara cepat, tepat maupun akurat. Dengan perkembangan TIK, dirasakan perlu untuk meningkatkan keterampilan aparatur dalam mengoperasikan komputer, sehingga diharapkan pihak aparatur di lingkungan pemerintah kedepan dapat memanfaatkan TIK guna menunjang dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas yang diemban. Dalam era globalisasi atau era informasi, transformasi sudah menjadi tuntutan dalam segala aktivitas kehidupan, sebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah berdampak pada perubahan-perubahan yang membawa kepada paradigma baru. Belum lagi dalam menghadapi iklim persaingan yang semakin terbuka disegala bidang pada saat ini. Maka aparatur maupun masyarakat dituntut untuk menguasai TIK sebagai bekal dalam menunjang tugas serta menangkap peluang dalam dunia kerja. Selain peningkatan SDM aparatur, bidang TIK juga dituntut untuk membudayakan pemanfaatan dan penggunaan TIK berbasis komputer bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga SDM ke depan dapat menghadapi tantangan perkembangan di era globalisasi.

## **8. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi. Era keterbukaan menuntut badan publik termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan informasi publik sebagai implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja melaksanakan pelayanan informasi publik.
- b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak.
- c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal badan publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

## **9. Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik.**

Pada dasarnya informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan kepentingan publik. Penyebaran informasi dilakukan melalui media partner yaitu membangun kemitraan dengan media elektronik untuk bekerjasama dalam menyebarluaskan informasi publik baik dalam bentuk acara penerangan, pendidikan atau acara hiburan. Dalam penggunaan media elektronik, penyebarluasan informasi dilakukan dengan dialog publik interaktif melalui radio, serta penggunaan media peliputan televisi. Penyebaran informasi dalam kegiatan ini juga sejalan dengan penerapan standar pelayanan minimal Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/Per./M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase desa yang dilayani informasi melalui media kesenian rakyat, persentase informasi yang disiarkan melalui dialog radio dan pesan layanan informasi dan jumlah peserta sarasehan informasi wawasan kebangsaan.

## **10. Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah.**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mencetak majalah informasi dengan melibatkan para penulis naskah yang berkompeten. Seluruh tulisan yang akan dimuat dalam majalah informasi sebelum dimuat dilakukan proses editing dari tim redaksi. Tujuan penyebaran informasi melalui majalah sebagai wujud informasi tercetak di antaranya meningkatkan budaya baca dan informasi di tengah-tengah kemajuan IT. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah majalah informasi yang disebarakan.

## **11. Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi**

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah menara telekomunikasi yang memberikan akses telekomunikasi. Meningkatnya kegiatan usaha jasa bidang telekomunikasi di Kabupaten Karangasem yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas alat komunikasi, telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya. Sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keindahan lingkungan, perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem. Sejalan dengan menjamurnya pendirian menara telekomunikasi, maka hal ini harus diantisipasi dengan payung hukum. Pada sisi peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah bisa lebih menggali potensi PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

## **12. Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi**

Saat teknologi berkembang pesat, fasilitas telekomunikasi juga berkembang dengan pesat termasuk fasilitas pos. Eksistensi pos di tengah-tengah kemajuan teknologi kadangkala terpinggirkan. Akan tetapi, kemajuan teknologi yang juga diadopsi oleh produk-produk pos perlu tetap disosialisasikan bagi masyarakat terutama pada masyarakat perdesaan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pos yang merupakan wujud dari pengembangan misi mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **5.3 Kelompok Sasaran**

Untuk dapat menentukan tercapainya tujuan dan sasaran terlebih dahulu menetapkan indikator sasaran program dan kegiatan, adapun indikator sasaran dimaksud adalah sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun				
		I	II	III	IV	V
Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelembagaan KIM	-	80%	85%	90%	100%
	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	-	50 orang	100 orang	80 orang	150 orang
	% desa yang dilayani informasi melalui media kesenian rakyat	-	-	23,08%	38,46%	38,46%
Meningkatnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.	% informasi yang disiarkan melalui dialog radio dan pesan layanan informasi		5,38%	26,54%	32,69%	38,46%
	Jumlah majalah informasi yang disebarakan	190	190	240	270	215
	Jumlah peserta sarasehan informasi wawasan kebangsaan		80 orang	100 orang	100 orang	100 orang
Meningkatnya pengembangan dan pemanfatan jaringan teknologi informasi	Persentase pengembangan jaringan hotspot pada SKPD	5,56%	11,11%	44,44%	11,76%	22,22%
	Jumlah pemeliharaan website	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
	% pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	0.00%	0.00%	0.00%	16,67%	83,33%
	Persentase lokasi (desa/sekolah) yang dilayani MPLIK	-	-	30,56%	30,56%	34,72
Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Jumlah SDM yang dilatih IT	0	0	0	78 orang	40 orang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun				
		I	II	III	IV	V
Meningkatnya infrastruktur layanan telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang memberikan akses telekomunikasi		82 menara	82 menara	85 menara	91 menara
	Jumlah repeater yang memberikan akses telekomunikasi	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pos	-	-	70 orang	80 orang	80 orang

#### 5.4 Pendanaan Indikatif

Adapun usulan program dan kegiatan indikatif dalam reviu renstra tahun 2013 adalah sebagai berikut.

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	
	2013	2014
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		
Penyediaan jasa surat menyurat	1,500,000	1,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lisrik	170,000,000	180,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	10,000,000	12,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	10,000,000	12,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,000,000	10,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dan Bangunan Kantor	2,000,000	2,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,000,000	4,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	8,000,000	10,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	70,000,000	70,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Admin/Teknis Keamanan	125,000,000	160,000,000
Penyediaan Biaya Canang, Bebanten Piodalan	10,800,000	13,000,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	10,000,000	10,000,000

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	
	2013	2014
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR		
Pengadaan Mebeleur	20,000,000	30,000,000
Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2,500,000	5,000,000
Pengadaan Alat-Alat Studio	10,000,000	-
Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	7,000,000	-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	8,000,000	30,000,000
Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	60,000,000	80,000,000
Pemeliharaan rutin / Berkala peralatan gedung kantor	12,000,000	15,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5,000,000	5,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor	5,000,000	-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit	250,000,000	200,000,000
PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisa Realisasi Kinerja SKPD	3,000,000	7,000,000
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA		
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	15,000,000	15,000,000
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	40,000,000	40,000,000
Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	55,000,000	55,000,000
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Dengan Lembaga komunikasi Sosial dan lembaga Komunikasi Pemerintah	45,000,000	45,000,000
Pemeliharaan dan Pengembangan Website	30,000,000	30,000,000
Peningkatan Hubungan Kerjasama Informasi Daerah Dalam Keanggotaan Citynet Indonesia	35,000,000	40,000,000
PENGAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	110,000,000	150,000,000
FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI		
Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	40,000,000	40,000,000

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN	
	2013	2014
KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASMEDIA		
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	35,000,000	50,000,000
Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Elektronik, Pertunjukan Seni Tradisional, Sarasehan, Pameran dan Dialog Publik.	200,000,000	180,000,000
Peningkatan layanan informasi pembangunan daerah dalam Majalah Sinar Agung	48,000,000	20,000,000
PROGRAM PENGEMBANGAN POS DAN TELEKOMUNIKASI		
Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	50,000,000	70,000,000
Penyebarluasan Informasi Pelayanan Pos Pedesaan Melalui sosialisasi	30,000,000	30,000,000
Jumlah Total Usulan Anggaran Indikatif	1,545,800,000	1,621,500,000

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Reviu rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangsem pada tahun 2013 adalah evaluasi atas beberapa indikator pada keseluruhan program dan kegiatan terutama yang dijadikan indikator kinerja utama. Reviu renstra ini merupakan salah satu acuan bagi pembangunan teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Karangasem dan merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kominfo tahun 2013.. Selain itu, reviu renstra Dinas Kominfo merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perlu disadari bahwa masalah komunikasi dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hal itu harus sudah dilakukan sejak penyusunan rencana kegiatan kurun waktu tahun 2011-2015 dan dalam penyusunan rencana kerja tahunan. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem teknologi informasi yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas implementasi teknologi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara optimal dan terpadu.

Pada prinsipnya, rencana strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih. Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar visi dan misi yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras menerjemahkan rencana tersebut ke dalam eksekusi nyata. Semoga rencana strategis sebagai dokumen perencanaan strategis ini akan dapat bermanfaat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Reviu Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 2011 -2015

NO	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN					
										INDIKATOR	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1			2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya Transparansi Komunikasi dan Informatika menuju Masyarakat Karangasem Jagadhita Ya Ca iti Dharma	Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk mewujudkan kualitas diseminasi dan layanan informasi dan komunikasi berbasis sosio kultural dan potensi lokal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Tercapainya peran-peran aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi edukatif	Desa-desa yang memiliki KIM di 8 kecamatan	Melaksanakan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya	Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan kepada lembaga informasi pada masyarakat	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan Pengembangan Kemitraan dengan Lembaga Komunikasi Sosial dan Lembaga Komunikasi Pemerintah	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelembagaan KIM	-	80%	85%	90%	100%
					Para stakholder Pemkab Karangasem, instansi vertikal, lembaga pemerintah.	Meningkatkan penyediaan layanan informasi dan dokumentasi pada setiap SKPD	Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan pelatihan kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	-	50 orang	100 orang	80 orang	130 orang
					Desa-desa di 8 kecamatan yang membutuhkan layanan informasi pemerintah	Meningkatkan pemberdayaan dan potensi kesenian rakyat sebagai sarana pengembangan dan penyebaran informasi	Melaksanakan diseminasi informasi edukatif kepada masyarakat perdesaan	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	Jumlah pelaksanaan pementasan seni bondres	-	-	3 kali	5 kali	5 kali
				Meningkatnya masyarakat informasi yang kritis, beradab, produktif, berdaya saing, dan cinta tanah air.	Masyarakat seluruh Kabupaten Karangasem	Menjadikan radio sebagai fasilitasi akses informasi edukatif kepada masyarakat	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	Jumlah pelaksanaan dialog radio		8 kali	27 kali	25 kali	15 kali	

			Seluruh SKPD, KIM, sekolah, masyarakat di 8 kecamatan	Melakukan editing informasi yang layak dan berguna bagi masyarakat		Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Peningkatan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah majalah informasi yang disebarakan	190	190	240	270	240
			Pelajar, mahasiswa, pemuda, masyarakat berbasis kesetaraan gender	Meningkatkan keterlibatan peran lembaga komunikasi, partai politik, pemuda, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang perjuangan bangsa	Melaksanakan edukasi informasi secara komprehensif dan timbal balik	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Penyebarluasan informasi publik melalui media cetak, elektronik, pertunjukan seni tradisional, sarasehan, pameran dan dialog publik	Jumlah peserta sarasehan informasi wawasan kebangsaan		80 orang	100 orang	100 orang	100 orang
Mengembangkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan, sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta layanan berbasis IT	Meningkatnya sumber daya dan aksesibilitas pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan jaringan teknologi informasi	Instansi pemerintah Kabupaten Karangasem	Menyiapkan infrastruktur fasilitas jaringan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Mengembangkan fasilitas LAN dan Hotspot	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah pengembangan jaringan hotspot pada SKPD	1 unit	2 unit	8 unit	2 unit	1 unit
			Jumlah pemeliharaan website	Menyediakan konten elektronik edukatif untuk kemudahan akses informasi	Mengembangkan sistem informasi melalui website pemerintah daerah	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Pemeliharaan dan Pengembangan Website	Jumlah pemeliharaan website	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit
			Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	Menyiapkan infrastruktur LPSE	Meningkatkan pelatihan pengelolaan LPSE	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Persentase paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui e-proc	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	70,00%

			Desa dan sekolah di 8 kecamatan yang minim akses informasi	Membuat pemetaan terhadap daerah atau lokasi yang ada fasilitas internet	Memfasilitasi pengoperasian Mobile Pusat Layanan Interneti Kecamatan	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	Jumlah lokasi kunjungan layanan internet kecamatan	-	-	22 lokasi	25 lokasi	25 lokasi
		Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Karangasem (ULP) dan penyedia barang dan jasa	Mengembangkan SDM di bidang komunikasi dan informatika	Melaksanakan pelatihan teknologi informasi secara bertahap	Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang dilatih IT	0	0	0	78 orang	55 orang (30 pokja+25 penyedia)
Mengoptimalkan pengelolaan pos perdesaan dan jasa usaha telekomunikasi untuk percepatan akses komunikasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya fungsi pos telekomunikasi sebagai media jasa telekomunikasi	Meningkatnya infrastruktur layanan telekomunikasi	Menara telekomunikasi di 8 kecamatan	Membuat pemetaan menara telekomunikasi di setiap daerah/kecamatan	Membuat produk hukum yang memuat tindakan keabsahan pemerintah yang mengatur wewenang, prosedur, dan substansi pengaturan dan pengendalian menara telekomunikasi	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pos dan Telekomunikasi	Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitoring		82 menara	82 menara	85 menara	91 menara
			Unit radio pancar ulang di 3 kecamatan	Pemetaan area blankspot (belum terdeteksinya sinyal radio) pada seluruh wilayah	Menyiapkan dan menambah infrastruktur radio pancar ulang		Biaya Jasa Pemeliharaan Repeater	Jumlah repeater terpelihara	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit

			Terselenggaranya layanan pos yang informatif, efektif, dan efisien	Siswa SMK/SMA di Amlapura	Menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos	Memberikan prioritas pemahaman pos bagi desa tertinggal dan terpencil	Pengembangan Pos dan Telekomunikasi	Penyebarluasan informasi pelayanan pos perdesaan melalui sosialisasi	Jumlah peserta tersosialisasi pos	-	-	70 orang	80 orang	25 orang
--	--	--	--	---------------------------	---	---	-------------------------------------	--	-----------------------------------	---	---	----------	----------	----------